



BeritaSatu Photo/Ruht Semiono

Rencana Penyesuaian Tarif Listrik Untuk Pelanggan Non Subsidi

Pekerja melakukan perawatan jaringan listrik di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (14/2/2022). Kementerian ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Ketenagalistrikan), Rida Mulyana menyampaikan akan menyesuaikan atau menaikkan tarif listrik untuk pelanggan non subsidi (tariff adjustment) paling cepat pada kuartal III-2022 atau bisa dimulai pada Juli 2022.

PLN-ESDM Kaji Realokasi Subsidi LPG

JAKARTA - PT PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang melakukan kajian terkait realokasi subsidi LPG untuk mempercepat program konversi kompor induksi. Realokasi subsidi itu guna memberikan kemudahan bagi masyarakat tidak mampu untuk memiliki kompor induksi. Bahkan pelanggan listrik subsidi pun akan dinaikkan kapasitas dayanya menjadi 2.200 volt ampere (VA).

Oleh **Rangga Prakoso**

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pengguna kompor induksi ditargetkan mencapai 8,3 juta rumah tangga di 2024 mendatang. Diperlukan strategi yang holistik dalam mencapai target tersebut mulai dari sisi kebijakan hingga dampak biaya yang tidak membebani masyarakat.

"Sedang dilakukan *assessment* menyeluruh. Ini tentu saja harus ada realokasi subsidi yang tadinya untuk LPG perlu dipindah dan direalokasi untuk mempercepat proses konversi kompor listrik. Ini dipimpin Kementerian ESDM dan melalui Kementerian Keuangan dan BKF," kata Darmawan di Jakarta, Senin (14/2).

Darmawan menjelaskan realokasi subsidi tidak berlaku bagi masyarakat mampu. PLN memberikan sejumlah kemudahan diantaranya keringanan tambah daya maupun memfasilitasi peralatan dapur di gerai-gerai, termasuk di pasar tradisional. Sedangkan bagi masyarakat tidak mampu, PLN akan menaikkan daya pelanggan subsidi 450 VA dan 900 VA menjadi 2.200 VA. Meski daya pelanggan subsidi meningkat, namun Darmawan menegaskan tarif listriknya tetap sama dan masih disubsidi.

"Untuk pergeseran ini kan perlu peralatan baru. Mulai dari kompornya, pancinya dan wajannya. Untuk itu,



Darmawan Prasodjo

kompor gas tak lagi bisa digunakan untuk kompor induksi. Bagi masyarakat mampu, PLN memberikan sejumlah kemudahan diantaranya keringanan tambah daya maupun memfasilitasi peralatan dapur di gerai-gerai, termasuk di pasar tradisional. Sedangkan bagi masyarakat tidak mampu, PLN akan menaikkan daya pelanggan subsidi 450 VA dan 900 VA menjadi 2.200 VA. Meski daya pelanggan subsidi meningkat, namun Darmawan menegaskan tarif listriknya tetap sama dan masih disubsidi.

"Untuk pergeseran ini kan perlu peralatan baru. Mulai dari kompornya, pancinya dan wajannya. Untuk itu,

“Sedang dilakukan *assessment* menyeluruh. Ini tentu saja harus ada realokasi subsidi yang tadinya untuk LPG perlu dipindah dan direalokasi untuk mempercepat proses konversi kompor listrik. Ini dipimpin Kementerian ESDM dan melalui Kementerian Keuangan dan BKF.

Darmawan Prasodjo
Direktur Utama PLN

diskusi internal kami, ini akan dibantu Rp 1 juta per keluarga. Ini sedang kami diskusikan. Jadi pergeserannya bisa lebih lancar karena tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat," ujarnya

Lebih lanjut Darmawan membeberkan perhitungan kebutuhan anggaran dalam program konversi tersebut. Untuk 8,3 juta rumah tangga diperlukan anggaran mencapai Rp 8,3 triliun dengan asumsi disetujuinya insentif sebesar Rp 1 juta per rumah tangga. Menurutny kebutuhan anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan alokasi subsidi LPG. Sebagai gambaran subsidi LPG di 2020 sebesar Rp 50,6 triliun, subdidi LPG di 2021 mencapai Rp 56,8 triliun dan di tahun ini subsidi LPG sebesar Rp 61 triliun. "Jadi ini [kebutuhan anggaran] sebenarnya kecil sekali," paparnya.

Dia menyebut penggunaan kompor induksi lebih hemat ketimbang menggunakan kompor gas. Perhitungannya biaya pemakaian 1 kg LPG non subsidi senilai Rp 13.500. Menurutny pemakaian 1 kg LPG tersebut setara dengan penggunaan daya 7 kilo watt hour (kWh) atau senilai Rp 10.268. Artinya penggunaan kompor induksi lebih murah Rp 3.250.

Penggunaan kompor induksi, kata Darmawan, mampu mengurangi kelebihan pasokan (over suplai) daya PLN yang mencapai 7 gigawatt (GW). Bila target pengguna kompor induksi bisa mencapai 10 juta rumah tangga maka kebutuhan daya mencapai 4-5 GW. "Jadi, kondisi over suplai bisa diselesaikan dengan konversi itu. Targetnya ke depan, impor BBM dan LPG secara keseluruhan yang meningkat harus segera diselesaikan," ujarnya.

Hitachi Energy Dukung Sistem HVDC di Indonesia

JAKARTA - Hitachi Energy yang sebelumnya dikenal sebagai Hitachi ABB Power Grids, menyatakan komitmennya untuk memajukan masa depan energi berkelanjutan di Indonesia, melalui sistem High Voltage Direct Current (HVDC) yang dapat menghubungkan jaringan interkoneksi kelistrikan antar pulau, seperti konsep Nusantara Super Grid.

Menurut Michel Burtin selaku Presiden Direktur PT Hitachi Sakti Energy Indonesia, sebagai salah satu penyedia teknologi terkemuka di dunia, Hitachi Energy berkomitmen untuk mendukung Indonesia melalui integrasi energi terbarukan, seperti energi surya dan angin, ke dalam sistem grid, menyediakan teknologi perintis, seperti Gardu Digital, Sistem Manajemen Energi Modern, Flexible Alternating Current Transmission Systems (FACTS) untuk membantu negara mengatasi masalah kualitas daya (*power quality*) dalam jaringan transmisi dan distribusi.

"Sebagian besar jaringan yang sudah ada dari beberapa waktu yang lalu, dan saat ini jaringan kelistrikan harus lebih fleksibel, efisien, dan dapat diandalkan untuk mendukung permintaan dan pasokan energi terbarukan yang akan datang, dan juga bisa mengatasi kompleksitas grid," kata Michael.

Indonesia merupakan pengguna ekonomi dan energi terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah telah menetapkan tujuan untuk netralitas karbon pada tahun 2060, sehingga perlu mengintensifkan upaya untuk mencapai integrasi energi terbarukan berskala besar. Menurut Michel, transisi energi saat ini memerlukan jaringan yang lebih kuat, lebih cerdas karena mengintegrasikan berbagai sumber energi, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan EBT.

Menurut Michel pertumbuhan konsumsi listrik akan mendorong sejumlah tantangan. Di tengah semakin meningkatnya pertumbuhan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan yang bersifat fluktuatif dan intermitensi yang tinggi, bersamaan juga terdapat kebutuhan untuk meningkatkan dan memperluas jaringan kelistrikan secara signifikan dengan tingkat digitalisasi yang tinggi untuk mengakomodir pertumbuhan pesat permintaan listrik dari sektor transportasi, industri dan bangunan.

"Listrik adalah tulang punggung dari seluruh sistem energi," jelas Michel. "Semua sektor di industri akan tumbuh secara signifikan dalam elektrifikasi. Transportasi listrik, proses heating serta konversi industri adalah pendorong utama. Saat ini, yang perlu diperhatikan selain mengoptimalkan penerapan dan pemanfaatan EBT, adalah bagaimana pada saat yang sama untuk tetap menjaga kestabilan dan ketahanan energi di Indonesia," ungkap Michel.

Hitachi Energy juga telah lama terlibat dalam beberapa proyek transisi energi. Sebagai contoh baru-baru ini, solusi integrasi jaringan perusahaan telah membantu menghubungkan pembangkit listrik tenaga panas bumi di dekat Rantau Dedap, di dataran tinggi terpencil di Sumatera Selatan, menyediakan 220 Megawatt listrik bebas karbon ke jaringan Sumatera.

Hitachi Energy di Indonesia juga telah terlibat dalam beberapa proyek transisi energi, seperti menerapkan solusi Grid Edge di beberapa wilayah nusantara, termasuk di antaranya: fasilitas *micro-grid* pertama dan terbesar di perusahaan tambang di Bontang. (es)



Michel Burtin

Bumi Siak Pusako Berkomitmen Tingkatkan Produksi Blok CPP

JAKARTA - PT Bumi Siak Pusako (BSP) berkomitmen meningkatkan produksi minyak bumi di Blok Blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP). Sejumlah skema telah disiapkan dalam mewujudkan komitmen tersebut. BSP merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pemegang saham Pemerintah Provinsi Riau sebesar 18%, Pemerintah Kabupaten Siak sebesar 72,29%, Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar 6,02%, Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar 2,41% dan Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar 1,21%.

Blok migas CPP secara resmi dikelola BSP pada 9 Agustus 2022 mendatang. Pengelolaan CPP sebelumnya dipegang Badan Operasi Bersama (BOB) PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT BSP. Direktur Utama BSP Iskandar mengatakan, ada peningkatan produksi diawali dengan eksplorasi yang akan dilakukan. "Jika eksplorasi-eksplorasi kami berhasil, dengan high case bisa hampir 50 ribu barel. Sedangkan low case lebih dari 20 ribu barel," kata Iskandar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (14/2).

Iskandar mengungkapkan pihaknya telah melakukan exclusive operation bersama PHW sejak 2020 hingga saat ini. Dalam kegiatan tersebut, BSP menggelontorkan investasi secara khusus untuk pengeboran sumur eksplorasi dan eksploitasi. Pada tahun ini tercatat ada 15 sumur pengembangan dan eksploitasi serta satu sumur eksploitasi yang akan dilakukan.

Di tempat yang sama, Direktur Pengembangan dan Produksi PHE Taufik Adityawarman menerangkan, kerjasama tersebut sebagai upaya guna memastikan transisi jelang alih kelola dapat berlangsung dengan baik. Harapannya BSP bisa melanjutkan program kerja serta menjaga kesinambungan produksi.

Sementara itu, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno menyebut Blok CPP mengalami penurunan produksi alamiah (*natural decline*) dari awal masa produksi hingga saat ini. Pada awal produksi di 2002 tercatat mencapai 40 ribu barel per hari (bph). Namun produksi terus menurun hingga 8.000 bph pada saat ini. Dia menerangkan telah menerapkan sejumlah teknologi dalam menjaga tingkatan penurunan produksi. Adapun target produksi Blok CPP tahun ini sebesar 9.000 bph. (rap)

PHE ONWJ Raih Sertifikasi Emas dari Polri

JAKARTA - PHE ONWJ yang tergabung dalam *Subholding Upstream* Zona 5 Regional Jawa meraih sertifikat kategori Emas (Gold) pada Sistem Manajemen Pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Penyerahan sertifikat diberikan secara langsung oleh Kepala Korps Samapta Bhayangkara Baharkam Polri Inspektur Jenderal Polisi Priyo Widyanto kepada Ridwan Widjanto selaku Pjs. *General Manager* Zona 5.

Zona 5 PHE ONWJ berhasil mengimplementasikan Sistem Manajemen Pengamanan berbasis Sistem Manajemen Pengamanan Nomor 7 tahun 2019 dan telah dinilai dari hasil audit eksternal yang dilaksanakan pada tanggal 1 - 3 Desember 2021 oleh Auditor dari Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Republik Indonesia.

Ridwan Widjanto, dalam acara tersebut mengungkapkan harapannya, "Dengan diterimanya sertifikat ini, kami berharap Manajemen Zona 5 PHE ONWJ senantiasa mempertahankan dan melakukan Improvement

pada Sistem Manajemen Pengamanan di masa yang akan datang," katanya.

Ekowisata

Sementara itu, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) IV Cilacap bersama Bupati Cilacap, Totto Suwanto Pamuji dan Forkopimda, mengunjungi kawasan ekowisata Karangsong di pesisir pantai Indramayu, Jawa Barat.

Menurut GM PT KPI RU VI Balongan Diandoro Arifin, ekowisata mangrove Karangsong merupakan salah satu upaya Pertamina bersama masyarakat dalam pemulihan kawasan pesisir dari bencana abrasi pada tahun 2000-an. "Desa Karangsong saat itu mengalami bencana abrasi yang cukup parah mengakibatkan tergerusnya lahan tambak warga," jelasnya.

Sebagai implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pihaknya fokus pada pemulihan lingkungan bersama kelompok Pantai Lestari merintis sejak 2008 dengan penanaman mangrove. "Hutan mangrove menjadi kawasan wisata dan pembelajaran sejak

diresmikan Menteri Lingkungan Hidup pada 2015. Selain untuk pengamanan tambak dari abrasi, ekowisata ini juga berdaya guna peningkatan pendapatan masyarakat," ujar Diandoro.

Diantaranya dengan pendirian Rumah Berdikari sebagai wadah kerajinan dan makanan khas Indramayu, pendidikan lingkungan hidup tematik mangrove, pengembangan inovasi olahan mangrove dan lain-lain. "Melalui program integrated mangrove, kami melakukan upaya konservasi, peningkatan ekonomi dan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup sejak dini," imbuh Diandoro.

Bupati Nina Agustina menambahkan, Indramayu memiliki garis pantai sepanjang 147 km dan terdapat sumber daya alam yang menjadi sektor unggulan, seperti mangrove dan konservasi makhluk hidup di dalamnya mulai burung-burung dan binatang lainnya. "Dengan kunjungan Bupati Cilacap dan rombongan PT KPI RU IV Cilacap ini menjadi semangat bagi kami untuk terus mengembangkan ekowisata mangrove," katanya.

Senada Bupati Totto Suwanto Pamuji menerangkan kunjungan ini menjadi media pembelajaran secara langsung pengelolaan mangrove Karangsong lengkap dengan program pendukungnya. "Cilacap juga memiliki Kolak Sekencil (Konservasi Laguna Kawasan Segara Anak Cilacap) binaan PT KPI RU IV Cilacap. Apa yang kami dapatkan dari kunjungan ini menjadi kaji banding dan penerapannya disesuaikan dengan kondisi di Cilacap," ungkapnya.

Pjs GM PT KPI RU IV Cilacap, Arief Budiyo menegaskan banyak pelajaran penting dari kunjungan langsung ke ekowisata mangrove Karangsong yang sangat bermanfaat untuk pengembangan Kolak Sekencil. "Ilmu dari Karangsong menjadi tambahan referensi untuk Kolak Sekencil dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan ciri khas di masing-masing daerah. Tujuan kita sama-sama mendukung program pemerintah, menjaga alam melalui konservasi mangrove, dan pemberdayaan masyarakat," pungkasnya. (es)

Manulife Investment Management

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS REKSA DANA MANULIFE

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), selaku Manajer Investasi dan Reksa Dana Manulife, dengan ini memberitahukan rencana perubahan sebagai berikut:

- Perubahan Prospektus seluruh Reksa Dana Manulife terkait:
 - Penambahan ketentuan pada seluruh Prospektus Reksa Dana Manulife terkait ketentuan Manajer Investasi untuk tidak menawarkan/ menjual Unit Penyerahan seluruh Reksa Dana Manulife kepada Orang Amerika Serikat (*United States Person*) atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat (*United States Person*); serta
 - Penyesuaian Susunan Direksi, Komite Investasi, dan Tim Pengelola Investasi Manajer Investasi terkini.
- Perubahan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus Reksa Dana Syariah Manulife terkait:
 - Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus Reksa Dana Syariah Manulife dengan (i) Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan; dan (ii) Surat Edaran OJK No. 1/SE/0JK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyalpaman Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
 - Penyesuaian ketentuan terkait biaya Bea Meterai yang menjadi beban Pemegang Unit Penyerahan (jika ada) yang akan dikenakan atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyerahan pada saat Pemegang Unit Penyerahan melakukan transaksi pembelian Unit Penyerahan (*subscription*); dan
 - Penyesuaian susunan Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi dan Bank Kustodian terkini.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyerahan serta pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Customer Service MAMI di (021) 25552255.

Jakarta, 15 Februari 2022

Manajer Investasi
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia